



WTP Singkawang Terhalang Aset

SINGKAWANG-RK. Laporan Keuangan Kota Singkawang tidak akan pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), bila permasalahan aset tidak segera diselesaikan.

"Kita harus segera menyelesaikan masalah aset ini. Bagaimanapun, sampai saat ini menjadi catatan dari BPK," kata Drs H Muslimin MSI, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Singkawang ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Muslimin mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Sambas sudah menyerahkan 169 dokumen aset kepada Pembkab Singkawang. Tetapi hingga kini, Singkawang

masih belum menyerahkannya Pemkot Singkawang. "Kami masih menunggu penyerahan dari Bengkayang untuk Tahap Pertama, yakni 169 dokumen aset," katanya.

Sebelumnya, ungap Muslimin, Sambas sudah menyerahkan 169 dokumen aset ke Bengkayang. Cuma Bengkayang ini yang belum menyerahkannya ke Singkawang. Padahal Singkawang sudah "memisahkan diri" dari Bengkawang sejak 14 tahun silam.

Muslimin mengungkapkan, Gubernur Kalbar telah menyurati Pembkab Bengkayang terkait penyerahan dokumen aset tersebut. "Penjelasan yang kami dapatkan sekitar dua minggu lalu, bahwa mereka saat ini masih melakukan pembahasan antara Pembkab Bengkayang dengan DPRD Bengkayang,"

jelasnya.

Masih dalam pembahasan, terus menerus menjadi alasan Bengkayang terkait penyerahan dokumen aset ini. Muslimin mengaku, belum mendapat kepastian, kapan penyerahannya dilakukan. "Posisi kita masih menunggu, namun kita tetap berupaya untuk menanyakan kejelasan penyerahan dokumen aset dari Bengkayang," ujarnya.

Muslimin mengungkapkan, Sambas tidak masalah dalam penyerahan dokumen aset tersebut. Bahkan, apabila Tahap Pertama (169 dokumen aset) selesai, Sambas kembali akan menyerahkan sekitar 70 dokumen aset. "Artinya kalau Bengkayang telah 169 dokumen aset ke Singkawang, barulah Sambas akan menyerahkan lagi," terangnya. **(hen)**